# LAYANAN KELOMPOK RENTAN, DIBAHAS SERIUS OLEH OMBUDSMAN BERSAMA MITRA TAF

**Kamis, 03 Mei 2018 - Anita Widyaning Putri**

YOGYAKARTA - Lokakarya Nasional Partisipasi Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia di Jogyakarta 2-4 Mei 2018, yang diselenggarakan Ombudsman bersama The Asia Foundation (TAF) membahas pelayanan publik kelompok rentan secara serius.

Peserta lokakarya yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil (CSO) dan Ombudsman tersebut, membahas berbagai pelayanan publik yang dirasa masih diskriminasi pada berbagai kelompok rentan. Sejumlah persoalan yang menyebabkan itu terjadi disampaikan oleh sejumlah perwakilan CSO mitraTAF dari berbagai wilayah di Indonesia.

Berbagai isu pelayanan publik yang dialami kelompok rentan di antara lain terkait pencantuman keyakinan atau agama lokal pada KTP, pembuatan akta lahir masyarakat adat yang perkawinannya tidak terdata, hak ulayat masyarakat adat yang tidak diakui, layanan dasar bagi transgender, diskriminatif dan tindakan kekerasan pada anak dan perempuan, serta berbagai persoalan lingkungan hidup yang berdampak pada pelayanan publik kelompok rentan.

Ombudsman dan TAF menyelenggarakan lokakarya ini dalam rangka membangun sinergi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. Diakui selama ini perspektif penyelenggara pelayanan publik terhadap kelompok rentan masih rendah, sehingga diskriminasi sering terjadi.

Ombudsman yang menghadirkan seluruh kepala perwakilannya, menyadari bahwa selama ini komunikasi dengan CSO masih terbatas. DR Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman yang menjadi penggagas dari lokakarya ini menyatakan diperlukan sinergi dan kolaborasi intensif antara Ombudsman dengan CSO, karena sama-sama mengharapkan pelayanan publik semakin baik dan masyarakat semakin memahami hak-haknya menyangkut pelayanan publik. Hasil dari lokakarya ini di antaranya terumuskan agenda bersama dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang selama ini tidak akses pelayanan publik.